113-123_plagiasi.docx

by Turnitin Official

Submission date: 06-Apr-2026 03:40PM (UTC+0900)
Submission ID: 2923627046
File name: 113-123_plagiasi.docx (64.01K)
Word count: 4480
Character count: 31818

Implementasi Kebijakan Cold Storage dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Nelayan di Sulawesi Selatan

Rakhmat Ramdana [1], Sukri[2], Ariana Yunus[3], Erwing Yanto[4]

Abstrak

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas penangkapan ikan. Meskipun Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, tingkat kesejahteraan nelayan masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya posisi tawar nelayan, keterbatasan fasilitas pascapanen, serta tingginya kerugian hasil tangkapan. Implementasi kebijakan *cold storage* sering menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan penyediaan *cold storage* dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar. Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif melalui *systematic literature review* yang dipadukan dengan pengumpulan data empiris dan telaah dokumen kebijakan sektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan *cold storage* mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberdayaan nelayan melalui penyediaan infrastruktur pascapanen. *Cold storage* berpotensi menjaga kualitas hasil tangkapan, mengurangi kehilangan pascapanen, serta meningkatkan fleksibilitas waktu penjualan belum optimal akibat lemahnya regulasi daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia nelayan, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan, serta belum terbangunnya sistem pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Olehnya, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nelayan dan integrasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan *cold storage*.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, *cold storage*, kesejahteraan nelayan, pemberdayaan nelayan, sektor perikanan

Abstract

The fisheries sector plays a strategic role in national economic development, particularly for coastal communities reliant on fishing activities. Although South Sulawesi Province possesses significant fishery resource potential, the welfare level of fishers remains relatively low. This condition is driven by fishers' weak bargaining power, limited post-harvest facilities, and high catch losses. Furthermore, the implementation of cold storage policies often faces various obstacles on the ground. This study aims to examine the implementation of the cold storage provision policy in improving fishers' welfare in South Sulawesi Province, specifically in Takalar Regency. The research employs an exploratory approach through a systematic literature review combined with empirical data collection and a review of fisheries sector policy documents. The results indicate that the cold storage policy reflects the government's commitment to supporting fisher empowerment through post-harvest infrastructure. While cold storage has the potential to maintain catch quality, reduce post-harvest losses, and increase sales time flexibility, its implementation has not been optimal due to weak local regulations, low human resource capacity, limited socialization, and the absence of a participatory and sustainable management system. Therefore, institutional strengthening, capacity building for fishers, and policy integration are key to the successful implementation of cold storage policies.

Keywords: *policy implementation, cold storage, fishermen's welfare, fishermen's empowerment, fisheries sector*

PENDAHULUAN

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi wilayah pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada aktivitas penangkapan ikan sebagai sumber mata pencaharian utama. Perikanan tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan dan peningkatan

pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa nelayan masih termasuk kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi akibat ketergantungan pada kondisi alam, fluktuasi hasil tangkapan, serta keterbatasan akses terhadap sarana produksi dan distribusi (Hardin, 2025).

Sektor perikanan merupakan salah satu bidang strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Namun implementasi berbagai kebijakan pengelolaannya kerap menghadapi tantangan dalam aspek sosial dan ekonomi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kebijakan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya, seperti pembatasan aktivitas penangkapan, memang memberikan dampak positif terhadap peningkatan stok ikan dan kelestarian ekosistem. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan penurunan pendapatan, kerawanan pangan, serta keterbatasan alternatif mata pencaharian bagi nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga memperhatikan dukungan infrastruktur ekonomi, seperti penyediaan *cold storage*, guna menjaga stabilitas hasil tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya di Sulawesi Selatan (Islam et al., 2021).

Dalam tiga tahun terakhir, sektor perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang cukup signifikan. Data statistik menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap meningkat dari sekitar 436 ribu ton pada tahun 2022 menjadi lebih dari 511 ribu ton pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2023 nilai ekonomi sektor ini diperkirakan mencapai sekitar Rp14,2 triliun, yang menegaskan peran strategis sektor perikanan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap Sulawesi Selatan

Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Nilai Ekonomi (Perkiraan)	Keterangan
2022	±436.735 ton	-	Produksi meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya
2023	±492.159 ton	±Rp14,2 triliun	Menunjukkan tren pertumbuhan sektor perikanan tangkap
2024	±511.291 ton	-	Data sementara statistik perikanan provinsi

Sumber: BPS & Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan

Di Provinsi Sulawesi Selatan, sektor perikanan tangkap memiliki potensi yang besar, namun kesejahteraan nelayan belum mencerminkan ketersediaan sumber daya tersebut. Permasalahan utama terletak pada lemahnya posisi tawar nelayan dalam rantai pemasaran serta keterbatasan fasilitas pascapanen, khususnya sarana penyimpanan. Kondisi ini memaksa nelayan menjual hasil tangkapan segera setelah mendarat dengan harga yang relatif rendah, terutama saat produksi melimpah. Akibatnya, nelayan tidak memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu penjualan yang lebih menguntungkan, sehingga nilai ekonomi hasil tangkapan cenderung lebih banyak dinikmati oleh pelaku perantara dibandingkan oleh nelayan sebagai produsen utama (Sutanto et al., 2024).

Keterbatasan infrastruktur pascapanen seperti *cold storage* juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai, nelayan tidak memiliki fleksibilitas untuk menunda penjualan hingga harga pasar lebih menguntungkan. Kondisi ini menyebabkan rantai nilai perikanan lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara dibandingkan oleh nelayan sebagai produsen utama. Oleh karena itu,

penyediaan fasilitas penyimpanan beku menjadi salah satu bentuk intervensi kebijakan yang penting untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok perikanan sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan dalam sistem pemasaran hasil tangkapan (Riadi et al., 2025).

Penyediaan ruang penyimpanan beku (*cold storage*) menjadi salah satu solusi kebijakan yang dinilai strategis untuk mengatasi permasalahan pascapanen di sektor perikanan. Fasilitas penyimpanan beku berfungsi untuk menjaga kualitas ikan, memperpanjang masa simpan, serta mengurangi kehilangan hasil tangkapan (*post-harvest loss*). Dengan adanya *cold storage*, nelayan diharapkan memiliki fleksibilitas waktu dalam menjual hasil tangkapan sehingga mampu meningkatkan nilai jual dan pendapatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur pascapanen berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan efisiensi rantai distribusi perikanan (Pusporini & Dahdah, 2020).

Pemerintah telah menyediakan fasilitas penyimpanan beku (*cold storage*) di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan, sebagai bentuk intervensi untuk memberdayakan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi kelautan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan, mengurangi ketergantungan nelayan pada tengkulak, serta mendorong pengelolaan hasil perikanan yang lebih berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai tantangan di tingkat pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas pengelolaan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana (Akil, 2013).

Dalam konteks implementasi kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga oleh faktor-faktor institusional, sosial, dan manajerial. Partisipasi nelayan, kejelasan mekanisme pengelolaan, keberlanjutan operasional, serta dukungan kebijakan daerah menjadi aspek penting yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila kebijakan tidak diimplementasikan secara optimal, maka tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan sulit tercapai dan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru (Muchlis et al., 2025).

Kebijakan publik, merupakan keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks pembangunan sektor perikanan, kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku (*cold storage*) merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan serta memperkuat posisi ekonomi nelayan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nelayan sebagai kelompok sasaran utama pembangunan sektor perikanan (Martarech et al., 2025).

Hasil kajian nantinya diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam penguatan tata kelola *cold storage*, penyusunan regulasi yang adaptif, serta pengembangan program pemberdayaan nelayan yang terintegrasi. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengelola fasilitas dan pemangku kepentingan sektor perikanan dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan infrastruktur pascapanen, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas nelayan agar mampu mengelola hasil tangkapan secara lebih produktif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali informasi awal mengenai suatu fenomena atau isu penelitian guna merumuskan pertanyaan yang lebih

spesifik untuk kajian lanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang memungkinkan peneliti menelaah literatur secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai penelitian terdahulu sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ada.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang dikembangkan oleh Virginia Braun dan Victoria Clarke yang dikutip dalam Yanto (2025). Proses ini meliputi beberapa tahap, yaitu: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan mendalam literatur; (2) pemberian kode awal terhadap ide, konsep, atau temuan penting; (3) identifikasi tema dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna; (4) peninjauan dan penamaan tema untuk memastikan konsistensi dengan fokus penelitian; serta (5) interpretasi dan sintesis akhir yang disajikan dalam bentuk narasi konseptual mengenai keterkaitan antar-tema serta implikasinya bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyediaan *Cold Storage* dalam Pemberdayaan Nelayan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku (*cold storage*) di Kabupaten Takalar merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung pemberdayaan nelayan dan penguatan sektor perikanan. Revitalisasi fasilitas yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan infrastruktur pascapanen dalam menjaga kualitas hasil tangkapan, mengurangi kerugian akibat pembusukan, dan memberi fleksibilitas waktu pemasaran bagi nelayan. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan (Sitorus, S.H., 2022).

Temuan kajian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan *cold storage* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan sosialisasi, rendahnya kapasitas nelayan dalam pengelolaan pascapanen, serta belum adanya sistem pengelolaan yang partisipatif. Selain itu, ketiadaan regulasi daerah yang spesifik menyebabkan lemahnya kejelasan peran antaraktor dan koordinasi antarinstansi, sehingga kebijakan ini belum terintegrasi secara optimal dengan program pemberdayaan nelayan. Implementasi kebijakan juga masih berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, sementara penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan belum menjadi perhatian utama.

Efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh dukungan regulasi, kapasitas aktor, dan kualitas tata kelola kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui penyusunan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, serta pengembangan sistem pengelolaan yang kolaboratif dan inklusif. Integrasi aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan kebutuhan riil nelayan, sehingga implementasi *cold storage* dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan (Ayu et al., 2020).

Keberadaan *cold storage* yang kembali beroperasi mulai memberikan dampak positif, khususnya dalam mengurangi potensi kerugian nelayan akibat pembusukan ikan saat hasil tangkapan melimpah. Fasilitas ini memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapan dalam kondisi beku sehingga kualitas ikan tetap terjaga dan pemasaran dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Meskipun demikian, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan masih belum signifikan karena tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut masih terbatas (Fernanto, G., 2022; Nesti et al., 2022).

Rendahnya tingkat pemanfaatan *cold storage* oleh nelayan menjadi salah satu temuan utama. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya sosialisasi

mengenai mekanisme penggunaan fasilitas, rendahnya pemahaman nelayan tentang manajemen pascapanen, serta belum adanya sistem pengelolaan yang melibatkan nelayan secara aktif. Kondisi ini menyebabkan *cold storage* belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan, tetapi masih dipersepsikan sebagai fasilitas pemerintah dengan akses dan penggunaan yang terbatas (Majuro A, 2019).

Kajian ini menemukan bahwa belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pemanfaatan *cold storage*. Meskipun demikian, secara umum kebijakan ini tetap memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menegaskan pentingnya pengelolaan hasil perikanan, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, penguatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, ketiadaan payung hukum daerah yang lebih spesifik berdampak pada belum jelasnya pembagian peran antaraktor, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum terintegrasinya kebijakan ini dengan program pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh dukungan regulasi dan tata kelola yang jelas (Purwantini & Saraswati, 2022).

Kualitas sumber daya manusia nelayan juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Sebagian besar nelayan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan belum memiliki keterampilan teknis dalam pengelolaan pascapanen berbasis teknologi. Kondisi ini menghambat optimalisasi pemanfaatan *cold storage* dan menunjukkan pentingnya program pelatihan serta pendampingan yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan masih cenderung berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, sementara aspek pemberdayaan dan penguatan kapasitas nelayan belum menjadi perhatian utama. Koordinasi antarinstansi juga belum berjalan optimal, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Ayu et al., 2020).

Temuan empiris tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan penyediaan *cold storage* telah dirancang sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan nelayan, implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas operasional. Hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan fasilitas oleh nelayan yang disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas teknis, serta belum adanya pola pengelolaan yang partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan aktor pelaksana dan penerima manfaat dalam mengelola serta memanfaatkan kebijakan tersebut secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat sasaran. Dinamika implementasi kebijakan ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara aspek kelembagaan, regulasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan program (Rasta, I.M., 2017).

Kajian ini menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait, mekanisme pengelolaan fasilitas penyimpanan beku, serta keterlibatan nelayan sebagai kelompok sasaran kebijakan. Fokus utama hasil kajian adalah kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dan praktik implementasi di lapangan, karena keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran (Arnenda & Rochman, 2021).

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku di Kabupaten Takalar telah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor perikanan dan pemberdayaan nelayan. Namun, implementasi kebijakan tersebut

belum berjalan optimal karena masih lemahnya dukungan regulasi daerah, terbatasnya partisipasi nelayan, serta belum terintegrasinya *cold storage* dengan program pemberdayaan yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, serta perbaikan tata kelola *cold storage* menjadi langkah strategis agar kebijakan ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan (Novalino & Wulandari, 2024).

Tabel 2. Aspek Pelaksanaan dan Temuan Implementasi Kebijakan Penyediaan *Cold Storage* di Kabupaten Takalar

Aspek Pelaksanaan Kebijakan	Hasil Analisis Literatur
Potensi Wilayah Pesisir	Wilayah pesisir Kabupaten Takalar sepanjang kurang lebih 74 km menjadi modal utama pengembangan sektor perikanan dan mendukung implementasi kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku sebagai sarana pemberdayaan nelayan.
Penyediaan Infrastruktur *Cold Storage*	*Cold storage* yang dibangun sejak tahun 2002 sempat tidak beroperasi karena kendala teknis dan ketidaksesuaian standar. Fasilitas ini baru diaktifkan kembali pada tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Fungsi dan Manfaat *Cold Storage*	*Cold storage* berfungsi menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan, menekan tingkat pembusukan, serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan di pasaran.
Pemanfaatan oleh Nelayan	Pemanfaatan *cold storage* oleh nelayan masih belum optimal karena keterbatasan sosialisasi, rendahnya pemahaman pengelolaan pascapanen, dan minimnya pendampingan teknis.
Dukungan Regulasi Daerah	Belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pemanfaatan *cold storage* sebagai instrumen pemberdayaan nelayan.
Peran Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator, namun implementasi kebijakan masih lebih berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik dibandingkan penguatan kapasitas nelayan.
Dampak terhadap Pemberdayaan Nelayan	Keberadaan *cold storage* berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi dampaknya belum maksimal akibat lemahnya integrasi kebijakan dan partisipasi nelayan.

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku (*cold storage*) di Kabupaten Takalar telah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan nelayan melalui penyediaan infrastruktur pascapanen. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya pada aspek pemanfaatan oleh nelayan, dukungan regulasi daerah, serta penguatan kapasitas dan partisipasi nelayan (Rasta, I.M., 2017). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan agar keberadaan *cold storage* dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan (Agash & Saravanakumar, 2025).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Penyimpanan Beku Terhadap kesejahteraan Nelayan

Kajian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan ruang penyimpanan beku (*cold storage*) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung implementasi kebijakan perikanan

yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Keberadaan fasilitas ini berfungsi untuk menjaga mutu hasil tangkapan, mengurangi kerugian pascapanen, memperpanjang masa simpan ikan, serta memberikan fleksibilitas waktu pemasaran. Dalam kerangka pemberdayaan ekonomi, *cold storage* tidak hanya berperan sebagai sarana teknis pascapanen, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat posisi tawar nelayan, dan menjaga stabilitas harga hasil perikanan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *cold storage* memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, khususnya pada wilayah pesisir yang bergantung pada hasil tangkapan harian (Said, 2022; Di & Banda, 2025).

Pendukung efisiensi pascapanen, keberadaan *cold storage* juga berimplikasi pada penguatan ketahanan pangan dan stabilitas pasokan ikan. Fasilitas penyimpanan beku memungkinkan hasil tangkapan tetap tersedia dalam kondisi layak konsumsi meskipun terjadi fluktuasi produksi atau hambatan distribusi. Dalam kondisi tersebut, *cold storage* berfungsi sebagai penyangga pasokan yang dapat menjaga kesinambungan distribusi ikan ke pasar sekaligus mengurangi tekanan penjualan pada saat produksi melimpah. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menopang ketersediaan pangan berbasis komoditas perikanan di tingkat lokal maupun regional (Wahyono, 2016; Marina et al., 2022).

Hasil Analisa Kajian juga menunjukkan bahwa *cold storage* dapat mendukung perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing hasil perikanan. Dengan kualitas ikan yang lebih terjaga, nelayan memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang menuntut standar mutu lebih tinggi, termasuk pasar antarwilayah dan pasar ekspor. Kondisi ini memberikan ruang bagi nelayan untuk memperoleh harga jual yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada pola penjualan cepat dengan harga rendah. Oleh karena itu, keberadaan *cold storage* perlu dipahami sebagai bagian dari sistem logistik perikanan yang berkontribusi terhadap efisiensi distribusi, penguatan rantai dingin, dan peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan (Hasani, M.C., 2026; Marina et al., 2022).

Hasil Kajian menunjukkan bahwa dampak positif kebijakan *cold storage* terhadap kesejahteraan nelayan tidak akan optimal tanpa dukungan tata kelola yang inklusif. Manfaat ekonomi dari fasilitas penyimpanan beku berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pihak yang memiliki modal, akses jaringan pasar, dan kontrol terhadap distribusi hasil perikanan. Dalam situasi demikian, nelayan kecil tetap berada pada posisi yang lemah meskipun infrastruktur telah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *cold storage* memerlukan mekanisme pengelolaan yang adil dan partisipatif agar manfaatnya tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan benar-benar mendukung pemerataan kesejahteraan nelayan (Atsuhi Sano, 2000; Purwantini & Saraswati, 2022). Faktor pendukung utama implementasi kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku terletak pada adanya komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem logistik perikanan melalui pengembangan rantai dingin (*cold chain system*). Dukungan kebijakan ini menempatkan *cold storage* sebagai sarana penting untuk menyerap hasil tangkapan, menjaga kualitas ikan, mengurangi kerugian pascapanen, dan menstabilkan harga pada tingkat produsen. Selain itu, keberadaan fasilitas ini menjadi lebih efektif apabila didukung oleh integrasi dengan program pemberdayaan nelayan, penguatan kelembagaan, serta akses pasar yang memadai. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara pembangunan infrastruktur dan strategi pemberdayaan ekonomi nelayan secara berkelanjutan (Di & Banda, 2025; Asniwati et al., 2022).

Hasil Analisa mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan *cold storage* masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada tingkat pemanfaatan oleh nelayan kecil. Hambatan utama yang paling sering muncul adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia nelayan, baik dalam

aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun kemampuan manajerial untuk mengelola fasilitas penyimpanan beku. Keterbatasan tersebut menyebabkan *cold storage* yang telah disediakan tidak selalu dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya pemahaman terhadap penanganan pascapanen berbasis teknologi juga memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas pengguna sebagai kelompok sasaran kebijakan (Sitorus, S.H., 2022).

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan tingginya biaya operasional, terutama biaya listrik, perawatan fasilitas, dan pengelolaan rutin yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi nelayan kecil. Dalam banyak kasus, biaya penggunaan *cold storage* justru menjadi beban tambahan yang mengurangi minat nelayan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Ketiadaan subsidi operasional, lemahnya dukungan pembiayaan, dan belum adanya jaminan pasar yang stabil menyebabkan manfaat ekonomi dari *cold storage* tidak dapat dirasakan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk menjamin akses penggunaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi nelayan (Muhammad , 2025).

Selain aspek biaya, hambatan implementasi juga muncul dari lemahnya koordinasi kelembagaan dan belum siapnya infrastruktur pendukung. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pembangunan *cold storage* sering kali tidak diikuti oleh kesiapan pelabuhan perikanan, akses transportasi, jaringan distribusi, dan sistem pemasaran yang mendukung. Akibatnya, fasilitas yang telah dibangun menjadi kurang efektif, tidak termanfaatkan secara maksimal, atau bahkan tidak beroperasi dalam jangka panjang. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas implementasi di lapangan, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan (Arnenda & Rochman, 2021; Hasani, M.C., 2026).

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengurangan kerugian pascapanen, stabilisasi harga, efisiensi distribusi, dan perluasan akses pasar. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara dukungan kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, infrastruktur pendukung, serta mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, *cold storage* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proyek fisik, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan nelayan yang terintegrasi agar manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan (Akil, 2013; Novalino & Wulandari, 2024).

PENUTUP

Kebijakan penyediaan ruang penyimpanan beku (*cold storage*) terbukti memiliki fungsi strategis dalam memperkuat sistem pascapanen perikanan melalui pengurangan kehilangan hasil tangkapan, penjagaan kualitas ikan, serta peningkatan fleksibilitas waktu penjualan yang berdampak pada penguatan posisi tawar nelayan. Namun, implementasinya di Kabupaten Takalar belum optimal karena lemahnya dukungan regulasi daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan, serta belum terbangunnya tata kelola yang partisipatif dan terintegrasi. Selain itu, tingginya biaya operasional dan belum optimalnya dukungan infrastruktur rantai dingin turut membatasi efektivitas pemanfaatan fasilitas *cold storage*.

Implikasinya, penguatan kebijakan perlu diarahkan pada integrasi antara penyediaan infrastruktur dengan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan nelayan melalui regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas teknis, serta model pengelolaan berbasis partisipasi. Kebaruan (*novelty*) kajian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan *cold storage* tidak cukup ditopang oleh aspek fisik semata,

melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang menghubungkan tata kelola kelembagaan, kapasitas aktor, dan integrasi rantai dingin sebagai satu kesatuan dalam kerangka pemberdayaan nelayan yang berkelanjutan.

REFERENSI

Agash, P., & Saravanakumar, P. (2025). *Impact of Marine Fishermen Welfare Schemes Implemented by The Government of Tamil Nadu : A Special Reference to Nagapattinam District*. *13*(2), 1111–1132.

Akil, (2013). *Sistem pemberdayaan masyarakat nelayan di kabupaten takalar*. 227–232.

Arnenda, G. L., & Rochman, F. (2021). *Characteristics Of Tuna , Small Tuna And Skipjack (Tts) Fishery In Kutaraja Ocean Fishing Port , Aceh*. *17*(2), 90–98.

Asniwati, A., Nur, A., Massiseng, A., & Irwansyah, I. (2022). *Dampak Program Bantuan Sarana Perikanan Terhadap Impact Of Fishery Facilities Assistance Program On Increasing Fishermen ' S Income In Barrang Caddi Island In Makassar City*.

Ayu, D., Sari, M., Hidayat, S., & Sutanto, S. H. (2020). *Peningkatan Pendapatan Nelayan Melalui Penanganan Hasil Tangkapan dengan Sistem Rantai Dingin di Kecamatan Kendari dan Nambo Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kecamatan Teluk Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. *14*(2), 193–203.

Di, T., & Banda, K. (2025). *Persepsi penerapan kebijakan kuota dan dampaknya bagi nelayan lokal dalam skema penangkapan ikan terukur di kepulauan banda*. *14*(1), 59–70. https://doi.org/10.30598/amanisal.v14i1.18847

Guntur, F., (2022). *Efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan*. 194–214.

Hasani, M.C., (2026). Disintermediation of Fresh Fish Distribution: Analysis of Online Market Efficiency and Logistics Barriers in Makassar City *SIGn Journal of Social Science*. *6*(2), 238–254.

Hardin (2025) Optimalisasi Ketersediaan Es Untuk Hasil Tangkapan Nelayan DesaBajo Sebagai Upaya Mendukung Asta Cita dan Agromaritim Halmahera Selatan, Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2025). *3 1,2,3*. *11*(November), 438–446.

Islam, M. M., Begum, A., Mohammad, S., Rahman, A., Hobday, A. J., & Hind-ozan, E. J. (2021). *Seasonal Fishery Closure in the Northern Bay of Bengal Causes Immediate but Contrasting Ecological and Socioeconomic Impacts*. *8*(September), 1–13. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.704056

Kholofah E R. (2023). *Empowerment of Fishermen Communities Amidst Elite Interest Conflicts : A Study on the Implementation of Integrated Cold Storage Policy in Jember , Indonesia*. *6*(2), 287–303. https://doi.org/10.37680/muharrik.v6i1.4714

Majuro A. (2019). *Review On The Investment Evaluation Of Department Of Maritime*. (2019). *2*(February), 62–71. https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.09

Marina, B. I., Ekonomi, S., Dan, K., Keuangan, S., & Padang, P. (2022). *Peran Gudang Pendingin (Cold Storage) dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pasir Jambak , Kota Padang The Role of Cold Storage in The Development of the Minapolitan Capture Fisheries in Pasir Jambak , Padang City*.

Martarech, M. I., Budiyanto, M. N., & Iriani, A. (2025). *Formulasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025*. *09*(02), 360–372.

Muchlis, K., Sellang, K., Rappang, M. S., & Kanie, D. (2025). *Peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan keberlanjutan pengelolaan badan usaha milik desa di desa kanie kabupaten sidenreng rappang*. *09*(01), 191–207.

Muhammad, F., (2025). *Implementasi Blue Economy dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Nelayan : Studi Kasus di PPI Mamuju Abstrak Pendahuluan*. *8*(4), 716–727. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1887

Nesti, L., (2022). *Simulasi dinamik pemanfaatan cold storage di pelabuhan perikanan samudera bungus dynamic simulation of cold storage utilization in bungus ocean fishing port*. *32*(3), 257–263.

Novalino, D., & Wulandari, N. (2024). *Implementation of the Measured Fishing Policy-Penangkapan Ikan Terukur (PIT) in the Riau Islands Province*. 119–127.

Purwantini, S., & Saraswati, I. (2022). *Analisis regulasi kelaiklautan dan keselamatan terhadap*

pemasangan alat pendingin frezeer pada kapal ikan. *4*(2), 12–20.

Pusporini, P., & Dahdah, S. S. (2020). *The Conceptual Framework of Cold Chain for Fishery Products in Indonesia*. *8*(2), 28–33. https://doi.org/10.13189/fst.2020.080202

Rasta I.M. (2017). *Technology Application of Environmental Friendly Refrigeration (Green Refrigeration) on Cold Storage for Fishery Industry Journal of Physics: Conf. Series 953 (2018) 012077*

Riadi, S., Damar, A., Purnamadewi, Y. L., Pertiwi, S., & Wahyudin, Y. (2025). *Optimizing capacity , occupancy , and turnover rate of fisheries cold storages in Lampung Province : a needs analysis*. *01011*.

Said, J. (2022). *Perancangan cold storage pada kapal nelayan tradisional terhadap penekanan biaya operasional dan kualitas ikan*. *17*(2), 138–144.

Sano Atsuhi, (2000). *Social Actors In The Global Market: Socio-Economic Impacts Ofshrimp Aquacultu EuR Research Information Portal. Cc*.

Sitorus, Sitti Hazar (2022) *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Peran Dan Kontribusi Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Kajian & Masyarakat*, P. M asyarakat Madani. *7*(1), 1–19.

Sutanto, H. A., Rachmansyah, Y., Hidayatullah, S. K. K., & Noviana, P. B. (2024). *Smallholder fisherme n's welfare : material, relational, and subjective perspectives kesejahteraan nelayan kecil: perspektif material, relasional dan subyektif*. *12*(01), 147–160.

Wahyono, A. (2016). *Karakteristik Nelayan Kecil Dalam Ketahanan Pangan Ikan : Kasus Di Kota Kendari , Sulawesi Tenggara The Characteristics Of Small Scale Fisheries In Food Security : A Case Study In Kendari , Southeast Sulawesi*. *18*(3), 319–338.

Yanto, E. (2025). *Agile Governance Sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Mall Pelayanan Publik : Studi Literatur Agile Governance As A Strategy To Improve The Performance Of Public Service Malls : Literatur Review*. *5*(2), 121–129.

113-123_plagiasi.docx

ORIGINALITY REPORT

12%	9%	7%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	2%
2	journal.intelekmadani.org Internet Source	1%
3	Djulia Indriani A.H Mahmud, Helman Manay, Andris K. Malae, Tonny Iskandar Mondong. "Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Pasokan Kabupaten Tojo Una-Una", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	1%
4	Widya Septyati, Tetty, Khairul Hafsar. "Analisis Kontribusi Subsektor Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau", MarIslands, 2025 Publication	1%
5	ifrelresearch.org Internet Source	1%
6	ejournal.appihi.or.id Internet Source	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	fr.scribd.com Internet Source	1%
9	Muhammad Ikrar Martarech, Muhammad Nur Budiyanto, Atrika Iriani. "Formulasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025",	<1%

Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2025
Publication

10	journalversa.com Internet Source	<1 %
11	terasjambi.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Fakultas ISIP Student Paper	<1 %
13	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
14	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	ejournal.pelitaindonesia.ac.id Internet Source	<1 %
17	ojs.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
18	"Harmonization and Ambiguity in Regulations for Physicians with Family Medicine Competence Post-Law No. 17 of 2023", Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 2026 Publication	<1 %
19	Ling Liana Tegila, Sahrain Bumulo, Dewinta Rizky. R. Hatu. "Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bumdes Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
20	Sastia Sindi Lasena, Ismet Sulila, Rustam Tohopi. "Implementasi Kebijakan Penertiban	<1 %

Hewan Ternak di Desa Bongomeme", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026
Publication

21	d-nb.info Internet Source	<1 %
22	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
23	kursdollar.net Internet Source	<1 %
24	repository.ipb.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
25	Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		